



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN

# DOKUMEN INFORMASI KINERJA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON

## LAPORAN PENDAHULUAN



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2020

# KATA PENGANTAR

**KATA PENGANTAR**

## KATA PENGANTAR

Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada peningkatan laju penggunaan sumberdaya alam, termasuk pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini mengakibatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) adalah sebagai informasi yang dapat memberikan gambaran tingkat keberhasilan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2019. Tujuan penyusunan dokumen IKPLHD Kabupaten Cirebon adalah:

1. Menyediakan basis data untuk meningkatkan mutu informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari sistem pelaporan publik dan sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
2. Menyediakan informasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan kinerja dan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah jangka pendek dan

menengah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;

3. Menyediakan sumber informasi sebagai dasar peningkatan kualitas pengambilan kebijakan/keputusan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan dengan daya dukung dan daya tampungnya.

Saran dan masukan dari semua pihak baik OPD terkait maupun akademisi, LSM dan masyarakat sangat diharapkan dalam proses yang akan ditempuh dalam proses penyusunan DIKPLHD Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sumber, September 2020

TIM PENYUSUN

# LAPORAN PENDAHULUAN DIKPLHD

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-3
BAB II   METODOLOGI.....	II-1
2.1 Proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah Kabupaten Cirebon.....	II-1
2.1 Ruang Lingkup Kajian.....	II-3
2.3 Sistematika Penulisan.....	II-4
LAMPIRAN	

# LAPORAN PENDAHULUAN DIKPLHD

**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah



# LAPORAN PENDAHULUAN DIKPLHD

**BAB 1  
PENDAHULUAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada peningkatan laju penggunaan sumberdaya alam, termasuk pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini mengakibatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Dalam satu dekade terakhir Kabupaten Cirebon telah menjadi salah satu pusat pengembangan industri khususnya di wilayah Jawa Barat bagian Timur. Pertumbuhan penduduk rata-rata dalam sepuluh tahun sebesar 2,14% per tahun. Hal ini menuntut upaya pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memenuhi kebutuhan akan pemukiman, lapangan pekerjaan, dan sarana prasarana dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan utilitas yang terpadu dan efisien.

Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam upaya menangani perubahan kualitas air, udara, serta timbulan sampah yang dihasilkan akibat pembangunan dan aktifitas masyarakat. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga

mampu menjaga kualitas lingkungan hingga generasi mendatang. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang agresif dan ekspansif untuk memenuhi kebutuhan aspek ekonomi dan sosial akan berdampak pada aspek lingkungan di wilayah tersebut. Bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Namun demikian apabila konservasi lingkungan menjadi fokus utama pembangunan maka tentu akan berpengaruh terhadap pembangunan serta kondisi sosial ekonomi-budaya, kesehatan, maupun pendidikan. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peduli lingkungan menjadi nilai tambah karena kondisi geografis yang terletak di wilayah Timur Jawa Barat menempatkan Kabupaten Cirebon menjadi wilayah strategis yang mampu menjadi pintu gerbang Jawa Barat dari Jawa tengah khususnya bagian Utara.

Kualitas hidup masyarakat yang baik merupakan wujud dari upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Gambaran kondisi multisektoral tersebut merupakan dasar analisis kondisi P-S-R (*Pressure-State-Response*) yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas lingkungan serta upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam berbagai bidang untuk menjaga kualitas lingkungan. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik, maka pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Cirebon menyediakan informasi dan data yang akurat melalui penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Cirebon yang merupakan capaian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengelola lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. DIKPLHD menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan lingkungan hidup untuk menjadu acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hidup.

Isu yang ditetapkan dalam penyusunan KPLHD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 yaitu :

1. Tataguna Lahan;
2. Kualitas Air;
3. Kualitas Udara
4. Resiko Bencana;
5. Perkotaan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) adalah sebagai informasi yang dapat memberikan gambaran tingkat keberhasilan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2019. Tujuan penyusunan dokumen IKPLHD Kabupaten Cirebon adalah:

1. Menyediakan basis data untuk meningkatkan mutu informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari sistem pelaporan publik dan sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
2. Menyediakan informasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan kinerja dan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah jangka pendek dan menengah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
3. Menyediakan sumber informasi sebagai dasar peningkatan kualitas pengambilan kebijakan/keputusan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan dengan daya dukung dan daya tampungnya.

# LAPORAN PENDAHULUAN DIKPLHD

**BAB 2**  
**METODOLOGI**

## BAB II METODOLOGI

### 2.1. Proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah Kabupaten Cirebon

Proses penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan pencatatan proses kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan penetapan kebijakan. Adapun proses penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah meliputi tahapan sebagai berikut :

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan kegiatan pembentukan tim penyusun dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Cirebon yang disahkan dalam Surat Keputusan Walikota dan keanggotaannya melibatkan unsur - unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi serta Lembaga Masyarakat/ Organisasi Lingkungan Hidup.

#### 2. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui survei langsung meliputi tataguna lahan, kerusakan tanah, monitoring dan pengawasan kualitas air hujan, air laut, air sungai serta kualitas udara.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya adalah dari peraturan perundang - undangan, kegiatan atau program yang dilakukan oleh OPD/instansi, institusi pendidikan, lembaga masyarakat/organisasi lingkungan hidup, buku dan jurnal.

#### 3. Tahap Perumusan Isu Prioritas

Isu prioritas merupakan isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Perumusan isu prioritas didasarkan proses secara

partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan. Proses perumusan isu prioritas menggunakan analisis PSR (*Pressure, State and Response*). Adapun langkah - langkah dalam penyusunan dan perumusan isu prioritas adalah sebagai berikut

#### A. Tahap Persiapan

Dalam merumuskan isu prioritas tahap persiapan yang dilakukan adalah membentuk personil penyusun.

#### B. Tahap Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon

1. Proses Penjaringan Awal Isu Prioritas Penjaringan awal isu - isu lingkungan di Kabupaten Cirebon mengacu pada beberapa sumber yang disesuaikan dengan isu prioritas sebagai berikut :

- Isu Pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Cirebon
- Isu - Isu Lingkungan Hidup menurut Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon

2. Pendekatan Analisis *Pressure - State - Response* (PSR)

Berdasarkan tata cara penyusunan dokumen IKPLHD proses penetapan isu prioritas harus dirumuskan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan wajib menggunakan pendekatan *Pressure - State - Response* (PSR). Pendekatan PSR merupakan pendekatan yang didasarkan pada konsep hubungan sebab akibat dimana aktivitas manusia memberikan tekanan pada lingkungan serta merubah kualitas maupun kuantitas sumber daya alam itu sendiri yang selanjutnya perubahan tersebut direspon oleh masyarakat. Respon terkait dengan sejauh apa masyarakat merespon isu lingkungan yang terjadi baik melalui aksi individu maupun kolektif. Pada akhirnya pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara *Pressure, State, dan Response* tersebut.

#### C. Tahap Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon

Proses analisis yang dilakukan oleh tim penyusun IKPLHD dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sampai dengan menghasilkan isu prioritas di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil analisis terdapat 5 (lima) isu prioritas yang dihadapi Kabupaten Cirebon. Kelima isu prioritas tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang disertai oleh tanda tangan kepala daerah.

#### 4. Tahap analisis data

Pada tahap ini memuat analisis *Pressure, State and Response* (PSR) untuk masing - masing isu lingkungan hidup yang telah dirumuskan meliputi tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan. Selain itu juga membahas inisiatif / inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Cirebon.

#### 5. Pembuatan *Executive summary*

*Executive summary* merupakan ringkasan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.

### 2.2. Ruang Lingkup Kajian

Tahapan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon (DIKPLHD) Tahun 2020 adalah:

1. Pengumpulan data dan informasi dari Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Cirebon termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon dan hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta.
2. Melakukan kompilasi data sesuai dengan format pedoman umum penyusunan nirwasita tantra, khusus buku 2 DIKPLHD.
3. Melakukan analisis data sesuai dengan metode D-P-S-I-R, sehingga keterkaitan antara kondisi lingkungan, faktor penyebab dan upaya yang telah dilakukan dapat terlihat secara utuh. Analisis terkait *Pressure, State and Response* dibahas berdasarkan isu lingkungan hidup daerah Kabupaten Cirebon yang berhubungan dengan :
  - a. Tataguna lahan



Pembahasan dalam sub bab tataguna lahan berkaitan dengan segala sesuatu tentang tata guna lahan berikut perubahannya diantaranya meliputi luas kawasan lindung berdasarkan RTRW dan tutupan lahannya, luas wilayah menurut penggunaan lahan utama, luas hutan berdasarkan fungsi dan status, kerusakan tanah di lahan kering serta luas dan kerapatan tutupan mangrove.

b. Kualitas air

Pembahasan dalam sub bab kualitas air meliputi analisis PSR kualitas air sungai, air danau/situ/embung, air sumur dan air laut.

c. Kualitas udara

Pembahasan dalam sub bab kualitas udara meliputi analisis PSR yang berhubungan dengan kondisi udara yang disertai dengan data pendukung berupa suhu udara, kualitas air hujan, kualitas udara ambien, indeks standar pencemaran udara (ISPU), kebakaran lahan, penyakit infeksi saluran pernapasan Akut (ISPA), sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak) dan penggunaan bahan bakar.

d. Resiko bencana

Pembahasan dalam sub bab resiko bencana meliputi analisis PSR pada resiko bencana yaitu berupa informasi wilayah rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam dan bencana non alam seperti kebakaran di kawasan pemukiman dan pergudangan.

e. Perkotaan

Pembahasan dalam sub bab perkotaan meliputi analisis PSR persoalan lingkungan perkotaan yaitu tentang persampahan.

4. Melakukan penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Cirebon.
5. Mendokumentasikan proses-proses penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Cirebon yang terbuka akses untuk publik;
6. FGD (*Focus Group Discussion*).

### 2.3. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dikelompokkan menjadi 5 pokok bahasan (Bab) dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang latar belakang, profil Kabupaten Cirebon, proses penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon, maksud dan tujuan, ruang lingkup penulisan serta sistematika penulisan.

#### BAB II. ANALISIS *PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON

Memuat uraian analisis PSR (*Pressure, State, and Response*) isu lingkungan hidup yang berkaitan dengan analisis tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan.

#### BAB III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON

Memuat uraian pembahasan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Cirebon beserta tahapan proses perumusan isu prioritas.

#### BAB IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Memuat uraian tentang upaya atau inisiatif - inisiatif yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

#### BAB V. PENUTUP

Memuat simpulan dari keseluruhan pokok - pokok pembahasan yang tersusun dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dan rencana tindak lanjut yang berimplikasi kepada kebijakan kepala daerah

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

# LAPORAN PENDAHULUAN DIKPLHD

**LAMPIRAN  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
DIKPLHD**

